

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur terkait penerapan sistem informasi akuntansi dapat penulis simpulkan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi yang dilakukan telah sesuai dengan Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan ditunjang penggunaan aplikasi berbasis *website* bernama SIPD yang merupakan rujukan dari Permendagri No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. BKAD Kabupaten Flores Timur telah melaksanakan peran sebagai entitas pelapor dalam upaya menghasilkan komponen laporan keuangan . Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan menggunakan aplikasi SIPD, perlu melewati tahapan input, proses, dan output.

1. Input

Dalam tahapan input yang telah dilakukan oleh BKAD Kabupaten Flores Timur dapat dilihat telah dilaksanakan dengan baik serta telah sesuai dengan aturan yang berlaku, baik itu Permendagri No. 70 Tahun 2019 maupun Permendagri No. 77 Tahun 2020.

2. Proses

Tahapan proses yang terjadi di dalam pengelolaan keuangan pada BKAD Kabupaten Flores Timur telah berjalan dengan baik dengan penggunaan

aplikasi SIPD sehingga menambah tingkat efektivitas dan memperkecil kemungkinan terjadinya kesalahan dalam proses penjurnalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Permendagri No. 70 Tahun 2019 maupun Permendagri No. 77 Tahun 2020.

3. Output

Pada tahapan output ini BKAD kabupaten Flores Timur telah menjalankan amanat dari itu Permendagri No. 70 Tahun 2019 maupun Permendagri No. 77 Tahun 2020, dengan berhasil menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.

6.2 Saran

Berdasarkan beberapa temuan yang didapati dalam proses penelitian ini, maka penulis melakukan analisis serta merumuskan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kementerian Dalam negeri Republik Indonesia

Perlu diadakannya pembekalan berupa bimbingan baik secara materi maupun teknikal terkait penggunaan SIPD oleh Kementerian Dalam Negeri kepada Setiap SKPD dan juga perangkat daerah lainnya secara bertahap, serta meningkatkan komunikasi antar pihak pengguna aplikasi sebagai langkah memaksimalkan fungsi, manfaat dan tujuan dari sistem itu sendiri.

2. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur

Menambah jumlah pegawai fungsional sebagai pelaksana penatausahaan keuangan gunaantisipasi terjadinya penumpukan tugas pada bidang tertentu.

3. SKPD yang bersangkutan

Dibutuhkan informasi lebih lanjut dari pemangku kebijakan kepada setiap SKPD bahwa dalam proses penginputan harus dilakukan tepat waktu untuk mencapai perwujudan *good governance* sehingga dapat diterima oleh operator tepat waktu.